



POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN



DUKCAPIL
GO
DIGITAL

#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DUKCAPIL
BISA

GAMBARAN UMUM

1. Informasi / Data tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen adalah Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat. Perkiraan capaian awal tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,5 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 86,00.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen adalah Meningkatkan cakupan penerbitan Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 pada cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 94,75% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai sebesar 95,45%.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yaitu Belum semua penduduk terdata dalam data base kependudukan sebagai permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelayanan wajib yang bukan termasuk dalam pelayanan dasar, namun pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan dasar dari seluruh pelayanan. Maka kepemilikan dokumen kependudukan menjadi sangat penting bagi seluruh masyarakat. Beberapa akar permasalahan dari penduduk yang belum seluruhnya memiliki dokumen kependudukan antara lain : 1) belum semua penduduk memiliki kesadaran akan pentingnya dokumen adminduk; 2) lokasi geografis tempat tinggal masyarakat pemohon yang jauh dari tempat pelayanan administrasi kependudukan; dan 3) belum tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen agar pelayanan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.

2. Belum seluruh penduduk terjangkau hak-hak layanan publik yang terintegrasi dengan data kependudukan

Tuntutan Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik utamanya dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal penduduk. Hal-hal yang memerlukan pembenahan terkait keterjangkauan penduduk akan hak-hal pelayanan publik yang terintegrasi dengan data kependudukan diantaranya : 1) keterbatasan SDM yang kompeten baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna mendukung tercapainya pelayanan prima administrasi kependudukan; 2) SOP belum mengikuti regulasi yang bersifat dinamis; 3) institusi pengguna data belum memahami pentingnya data kependudukan dari Dukcapil; 4) sosialisasi adminduk belum menjangkau semua unsur lapisan; dan 5) budaya masyarakat yang menunda pengurusan administrasi kependudukan sehingga data kependudukan tidak valid dan akurat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diamanatkan bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:
 - a. Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tanpa biaya;

- b. Perkembangan teknologi informasi menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat;
 - c. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pelayanan publik.
2. Satu data kependudukan secara nasional. NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir bahkan dibawa setelah meninggal dunia sehingga diperlukan NIK sebagai identitas tunggal administrasi.
- a. Implementasi integrasi *big data* kependudukan dalam semua proses pemerintahan di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2019. Integrasi big data ini memudahkan dalam semua proses pemerintahan. Proses tersebut secara bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan instansi-instansi pelayanan publik.
 - b. Big data mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik;
 - c. Semua penduduk memiliki identitas Salah satu hak penduduk diantaranya adalah setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya dokumen kependudukan tersebut maka hak-hak publik dalam pelayanan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya kemudahan dalam pelayanan diharapkan masyarakat memiliki semua dokumen kependudukan seperti KTP-el, KIA, KK dan Akta capil serta dokumen kependudukan lainnya.
3. Administrasi kependudukan menuju Go-Digital.
- a. Implementasi Go-Digital bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat dan membahagiakan masyarakat;
 - b. Mulai tahun 2019 jajaran Dukcapil telah menggunakan tanda tangan digital untuk mengurus data administrasi kependudukan (Adminduk).
 - c. Masyarakat bisa mengurus keperluan layanan kependudukan seperti akta kelahiran, tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Cukup mengisi formulir online, tekan enter dan data kependudukan yang diperlukan pun hadir sekejap mata. Bisa diprint out sendiri aktanya oleh penduduk dari rumah

3. POHON KINERJA

3.1. Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

- 3.1.1. Meningkatnya Perencanaan, Evaluasi, Administrasi Umum, dan Keuangan
Dengan meningkatnya Perencanaan, Evaluasi, Administrasi Umum, dan Keuangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, administrasi umum dan penatausahaan keuangan sehingga dapat menunjang fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- 3.1.2. Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dengan meningkatnya jumlah penerbitan dokumen kependudukan diharapkan seluruh penduduk Kabupaten Kebumen terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga dapat membantu meningkatkan keterjangkauan layanan publik bagi seluruh penduduk.
- 3.1.3. Meningkatnya Keterjangkauan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Data Kependudukan
Dengan Meningkatnya Keterjangkauan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Data Kependudukan dapat membantu mewujudkan NIK sebagai identitas tunggal penduduk guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi penduduk.

3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*)

Outcome	CSF
Meningkatnya cakupan penerbitan Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya Perencanaan, Evaluasi, Administrasi Umum, dan Keuangan
	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Keterjangkauan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Data Kependudukan
	Meningkatnya kemanfaatan NIK pada PPDB (<i>crosscutting</i> dengan Disdik)
	Meningkatnya akurasi data penduduk berdasarkan Pendidikan dan pekerjaan (<i>Crosscutting</i> dengan Dinsos)

3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

CSF Sasaran Kegiatan (beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)	KONDISI YANG DIPERLUKAN Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Perencanaan, Evaluasi, Administrasi Umum, dan Keuangan	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah
	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah
	Bertambahnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk
	Meningkatnya penataan pendaftaran penduduk
	Meningkatnya penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil
	Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil
Meningkatnya Keterjangkauan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Data Kependudukan	Meningkatnya kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Adapun Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada diagram berikut:

Ultimate Outcome

Intermediete Outcome

Immediete Outcome

Output

Output

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya cakupan penerbitan Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
IK : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Meningkatnya akurasi data penduduk berdasarkan status pendidikan dan pekerjaan
IK : update data kependudukan berdasarkan Pendidikan dan pekerjaan (crosscutting dengan Dinas)

Meningkatnya keberagaman Nomor Induk Kependudukan untuk mendukung proses PPDB (crosscutting dengan Disdik)
IK : Update data kependudukan untuk mendukung proses PPDB (crosscutting dengan Disdik)

Meningkatnya Perencanaan, Evaluasi, Administrasi Umum, dan Keuangan
IK : Capaian penunjang urusan pemerintah daerah

Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
IK : Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Meningkatnya Keterjangkauan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Data Kependudukan
IK : Keterjangkauan layanan publik yang telah memanfaatkan data kependudukan

Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
IK : Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah
IK : Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah
IK : Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah

Bertambahnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
IK : Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
IK : Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
IK : Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk
IK : Jumlah layanan pendaftaran penduduk

Meningkatnya penataan penataan administrasi kependudukan
IK : Jumlah kegiatan penataan administrasi kependudukan

Meningkatnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk
IK : Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil
IK : Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil

Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil
IK : Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil

Meningkatnya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
IK : Jumlah buku data kependudukan

Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
IK : Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan

Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
IK : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
IK : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
IK : Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan

Tersedianya mebel
IK : Jumlah paket mebel yang disediakan

Tersedianya jasa surat menyurat
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa Surat menyurat

Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perzinannya
IK : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perzinannya

Tersedianya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
IK : Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk

Tersedianya pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-EI dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan
IK : Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-EI dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan

Tersedianya sosialisasi pendaftaran penduduk
IK : Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk

Tersedianya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan atas pelaporan peristiwa penting
IK : Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan atas pelaporan peristiwa penting

Tersedianya koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kab/kota
IK : Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kab/kota

Tersedianya pengolahan dan penyajian data kependudukan
IK : Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan

Tersedianya fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
IK : Jumlah laporan hasil fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah
IK : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Tersedianya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
IK : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

Tersedianya bahan logistik kantor
IK : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

Tersedianya peralatan dan mesin lainnya
IK : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Yang disediakan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Tersedianya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
IK : Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk

Tersedianya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan
IK : Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan

Tersedianya peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
IK : Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang ditingkatkan

Tersedianya pemanfaatan data kependudukan
IK : Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan

Tersedianya komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
IK : Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
IK : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Yang disediakan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
IK : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dsediakan

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Yang disediakan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

Tersedianya bahan/ material
IK : Jumlah paket bahan/ material yang dsediakan

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Yang disediakan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
IK : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Yang disediakan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

Tersedianya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
IK : Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Yang disediakan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Ultimate Outcome	Intermediete Outcome	Immediate Outcome	Output (Kondisi yang diperlukan)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pemda)					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya cakupan penerbitan Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				Nilai Indikator Kinerja Utama (IKU)
		Meningkatnya Perencanaan, Evaluasi, Administrasi Umum, dan Keuangan			Capaian penunjang urusan pemerintah daerah
			Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
				Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/

				keuangan SKPD	verifikasi keuangan SKPD
			Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah
				Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
				Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan
				Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
				Tersedianya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
			Bertambahnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
				Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan

				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
			Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
				Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
			Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya
				Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara

				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
				Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
		Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah layanan pendaftaran penduduk
				Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
				Terlaksananya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
				Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan
			Meningkatnya penataan pendaftaran penduduk		Jumlah kegiatan penataan administrasi kependudukan
				Terlaksananya pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-EI dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-EI dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan

			Meningkatnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk		Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
				Terlaksananya sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk
			Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil		Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil
				Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan atas pelaporan peristiwa penting
				Terlaksananya peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang ditingkatkan
			Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil		Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil
				Terlaksananya koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kab/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kab/kota
		Meningkatnya Keterjangkauan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Data Kependudukan			Keterjangkauan layanan publik yang telah memanfaatkan data kependudukan
			Meningkatnya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan		Jumlah buku data kependudukan
				Terlaksananya pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan

			Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan
				Terlaksananya fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
				Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
				Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat